

**STRATEGI MEMBANGUN BARGAINING ANTARA EKSEKUTIF DAN
LEGISLATIF DI PEMERINTAHAN ACEH
(Studi Kasus DPW PKS Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

**SAKTIAN BAHRUL
NIIM. 150801095
Program Studi Ilmu Politik**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH**

2022 M

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

**STRATEGI MEMBANGUN BARGAINING ANTARA EKSEKUTIF DAN
LEGISLATIF DI PEMERINTAHAN ACEH**

(Studi Kasus DPW Aceh)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN) Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Politik

Oleh:

Saktian Bahrul
NIM: 150801095

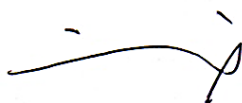
Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

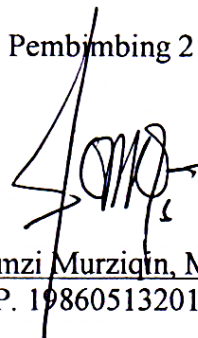
Disetujui Untuk Dimunaqasahkan Oleh:

Pembimbing 1



Muhammad Thalal, Lc., M.S., M.Ed
NIP. 197309212000032002

Pembimbing 2



Ramzi Murziqin, M.A
NIP. 198605132019031006

**STRATEGI MEMBANGUN BARGAINING ANTARA EKSEKUTIF DAN
LEGISLATIF DI PEMERINTAHAN ACEH
(Studi Kasus DPW PKS Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diujikan Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Politik
Pada Hari/Tanggal: Rabu, 27 Juli 2022 M
2 Safar 1447 H

di Darussalam Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Muhammad Thalal, Lc.M.S.,M.Ed

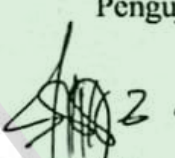
NIP: 197810162008011011


Ramzi Murziqin, S.H.I.,M.A

NIP: 198605132019031006

Penguji I,

Penguji II,


Rizkika Lhena Darwin, M.A

NIP: 198812072018032001


Danil Akbar Taqwadin, B.IAM,M.Sc, PhD

NIP: 198904082023211022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Ernita Dewi, S.Ag.,M.Hum.

NIP. 197307232000032002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Saktian Bahrul

NIM : 150801095

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi: Ilmu Politik

Menyatakan bahwa dalam Kripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Fisip UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 26 Juli 2022

Yang Menyatakan,



Saktian Bahrul

A R - R A N I R

NIM. 150801095

ABSTRAK

Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu lembaga mitra non pemerintahan, atau bukan dari koalisi pemilihan pemerintah (eksekutif), PKS tetap melakukan pengawasan dengan ketat dan mengkritisi setiap program atau tindakan yang dangkal dari unsur pemerintah, dan mendukung setiap program yang kompeten. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui strategi DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun *bargaining* politik dengan pemerintahan Aceh yaitu legislatif dan eksekutif, serta bagaimana hambatan DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun hubungan Politik dengan pemerintah Aceh. Metodologi penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data penelitian ini bersumber dari pengurus DPW Partai Keadilan Sejahtera Aceh. Pengumpulan data melalui wawancara, dan analisis data dengan reduksi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, strategi DPW Partai Keadilan Sejahtera dalam membangun *bargaining* politik dengan pemerintahan Aceh dilakukan dengan menggunakan pendekatan : (1) *bargaining pass political*, yaitu dengan ikut serta dalam agenda-agenda pertemuan antar partai politik nasional maupun partai lokal, dengan membahas kebijakan-kebijakan pemerintah ke arah lebih baik. DPW PKS menyampaikan berbagai saran dan pandangan kepada partai pihak pelaksana tugas secara langsung kepada lembaga pemerintahan. (2) *bargaining* isu publik, dalam hal ini DPW PKS menggunakan isu publik dalam membangun hubungan dengan pemerintah Aceh dengan mengadvokasikan permasalahan rakyat untuk diperjuangkan sehingga mendapatkan keadilan dari pemerintah. Sedangkan hambatan DPW PKS dalam membangun *bargaining* politik yaitu kurangnya perwakilan fraksi PKS yang berada di pemerintahan (legislatif) sehingga menyulitkan peran PKS dalam mendorong kebijakan yang pro-rakyat. Adapun kesimpulannya, strategi yang digunakan DPW PKS yaitu: (1) pola *bargaining* partisipasi partai. Yaitu, pendekatan tahap awal untuk ikut serta menjadi bagian pelaksana politik, melalui tahap ini bertujuan mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pro rakyat dan mengkritisi secara mendalam setiap kebijakan yang merugikan rakyat. (2) pola *bargaining* isu publik. Yaitu, pendekatan yang digunakan dengan memanfaatkan isu publik untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah dengan mengedepankan suara-suara rakyat. Sedangkan hambatan yaitu kurangnya perwakilan fraksi PKS yang berada dalam pemerintahan (legislatif) sehingga menyulitkan peran PKS dalam menentukan kebijakan.

Kata Kunci : Strategi, *Bargaining*, Partai Keadilan Sejahtera

KATA PENGANTAR

Puji beserta syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, dengan karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penyusunan Karya Ilmiah ini. Shalawat serta salam penulis hantarkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah mengubah peradaban manusia dari masa Jahiliyah sampai ke masa yang Islamiah.

Penulis skripsi yang berjudul “Strategi Membangun *Bargaining* Antara Eksekutif dan Legeslatif di Pemerintahan Aceh (Studi Kasus DPW PKS Aceh). maksud dan tujuan penulis skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan semua pihak, karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada bapak Muhammad Thalal, Lc.,M.S., M. Ed selaku pembimbing I yang telah mengorbankan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, kemudian penulis turut mengucapkan terimakasih kepada bapak Ramzi Murziqin, M.A selaku pembimbing II yang telah menyumbangkan pemikiran serta saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK.,MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Ibu Dr. Ermita Dewi, S. Ag. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Teristimewa kepada ayahanda Buhani serta ibunda tersayang Idariani (Alm) yang selalu mengirimkan do'a yang tak henti-hentinya, perjuangan dan pengorbanan yang tak terhitung nilainya yang telah diberikan kepada penulis untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A. selaku Ketua Jurusan Program Studi Ilmu Politik dan selaku penasehat akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Araniry Banda Aceh.
5. Sahabat-sahabat terbaik Ilmu Politik Ikhwaniul Rijal, Taufiq, Agam Nur Muhajir, Teguh dan Furqan Nurzi yang selalu mendampingi penulis dalam suka maupun duka yang selalu memberikan suntikan-suntikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf apabila banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi semua.

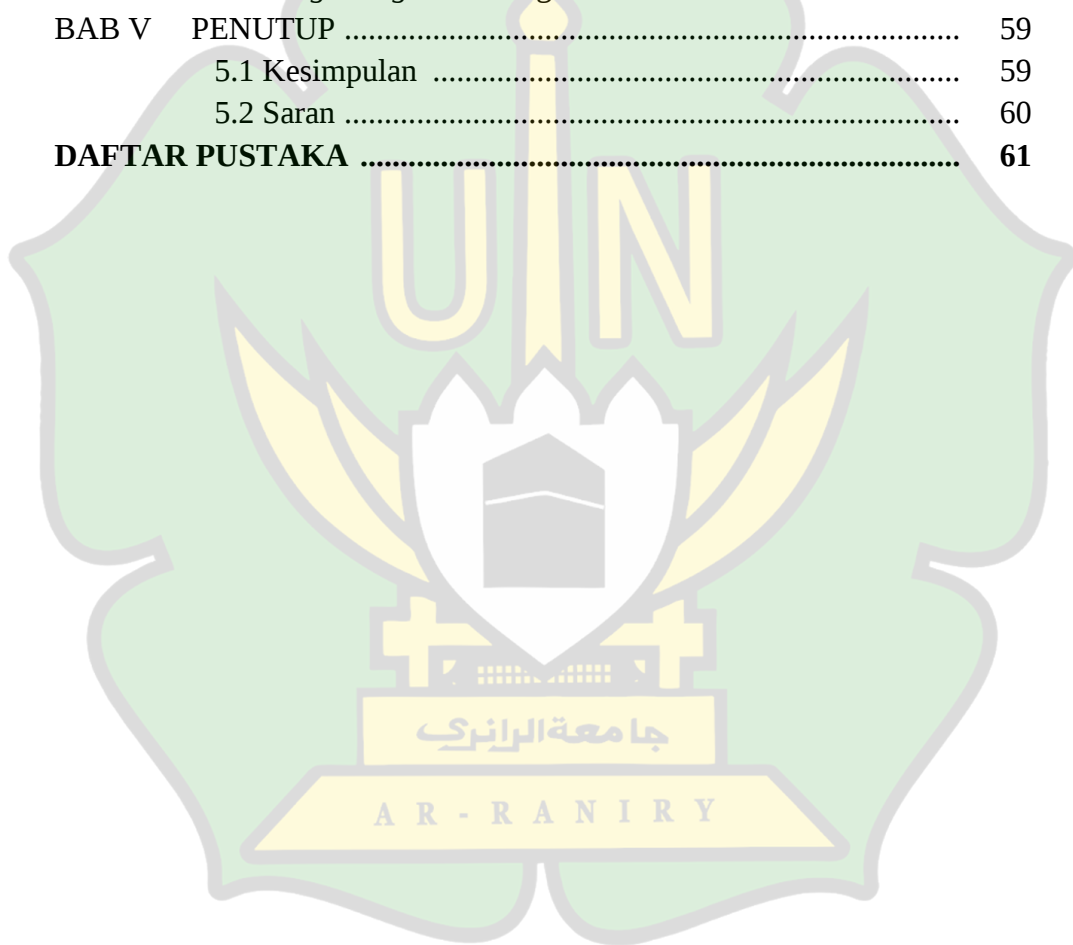
Banda Aceh, 21 Juli 2022

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Mamfaat Penelitian	6
1.5 Definisi Operasional	7
1.6 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORITIS	10
2.1 Strategi	10
2.1.1 Jenis-jenis Strategi	11
2.2 Partai Politik	12
2.2.1 Peran dan Fungsi Partai Politik	14
2.2.2 Tujuan Partai Politik	16
2.2.3 Partisipasi Partai Politi	18
2.3 <i>Bargaining</i>	19
2.4 Eksekutif.....	22
2.5 Legislatif	25
2.6 Hambatan	27
2.7 Literatur Review	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Studi Kasus Deskriptif	31
3.3 Fokus Penelitian	33
3.4 Lokasi Penelitian	34
3.5 Sumber data	34
3.6 Informan Penelitian	35
3.7 Teknik Pengumpulan Data	35
3.8 Tenik Analisis Data	36

BAB IV	PEMBAHASAN	39
4.1	Profil Provinsi Aceh	39
4.2	Profil Partai Keadilan Sejahtera	40
4.2.1	Visi Misi Partai Keadilan Sejahtera	44
4.3	Strategi DPW PKS Aceh dalam Membangun <i>Bargaining</i> antara Legislatif dan Eksekutif	46
4.3.1	Pola <i>Bargaining Pass Political</i>	47
4.3.2	Pola <i>Bargaining</i> Isu Publik	54
4.4	Hambatan DPW PKS Aceh dalam Membangun <i>Bargaining</i> antara Legislatif dan Eksekutif	56
BAB V	PENUTUP	59
5.1	Kesimpulan	59
5.2	Saran	60
DAFTAR PUSTAKA		61

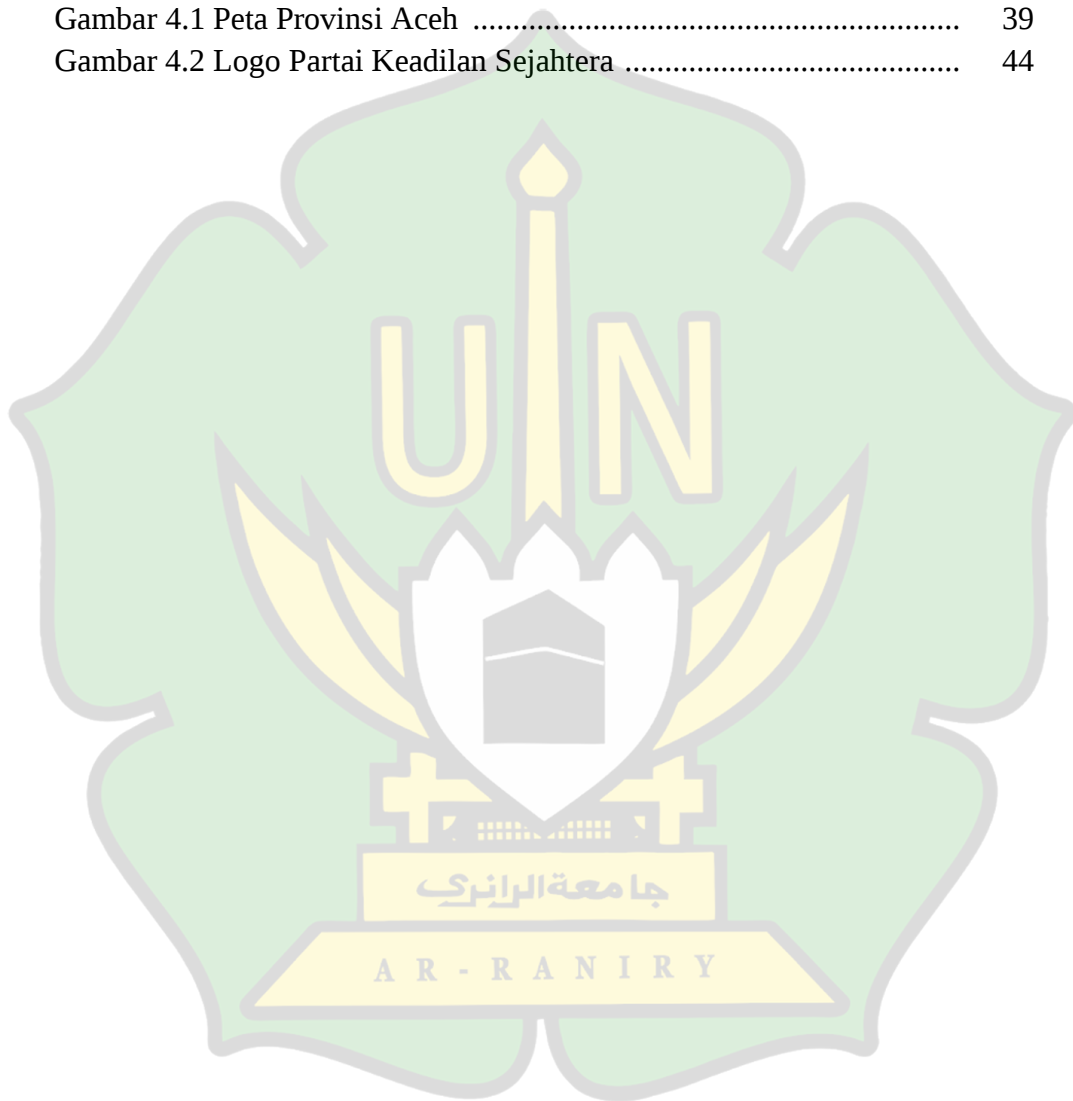


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Informan Penelitian	35
---------------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Peta Provinsi Aceh	39
Gambar 4.2 Logo Partai Keadilan Sejahtera	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sistem negara demokrasi, Indonesia memiliki dua lembaga seperti eksekutif dan legislatif yang saling membutuhkan untuk mengemban pelaksanaan prinsip pembagian kekuasaan di tingkat pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai institusi eksekutif dan legislatif masing-masing memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing, namun keduanya terikat dalam tata hubungan dalam sistem pemerintahan.¹

Eksekutif merupakan sebuah lembaga negara yang menjalankan roda pemerintahan baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan desa. Tugas badan eksekutif menurut tafsiran tradisional azas politika hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif serta menyelenggarakan undang-undang yang dibuat oleh badan legislatif. Akan tetapi dalam pelaksanaannya badan eksekutif memiliki ruang gerak yang luas untuk menjalankan sistem pemerintahan.² Hubungan antara legislatif dengan eksekutif akan muncul berkaitan dengan dilaksanakannya tugas dan wewenang masing-masing, terutama bidang tugas yang menjadi urusan bersama seperti pembuatan peraturan.³ Eksekutif dan legislatif memiliki visi yang sama dalam menjalankan

¹I Gde Panca Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Bandung: alumni, 2008. hlm: 112.

²Affan Gaffar.dkk, *Hubungan Eksekutif dan Legislatif di Daerah*, Yogyakarta: Fisipol Universitas Gajah Mada, 2000, hlm: 45.

³Bambang Yudoyono, *Otonomi Daerah Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2001, hlm: 95.

roda pemerintahan dan menciptakan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun hal yang perlu dibangun yaitu: komunikasi dan tukar menukar informasi (transparan).

Menurut Rush dan Althof, komunikasi politik sebuah transmisi informasi yang relevan secara politis dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dengan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik, dan proses sosialisasi, partisipasi, serta rekrutmen politik tergantung pada komunikasi.⁴ Sedangkan dalam konteks sosialisasi politik, Graber menilai komunikasi politik sebagai proses pembelajaran, penerimaan dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan atau aturan-aturan, struktur dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik.⁵

Strategi komunikasi pada dasarnya merupakan perencanaan komunikasi untuk mencapai suatu target seseorang atau kelompok, maka strategi komunikasi harus memperlihatkan manajemennya secara teknis harus dilakukan seperti bagaimana bentuk pesannya, siapa komunikatornya, serta media apa yang digunakan untuk menyampaikan pesan tersebut dan output apa yang diinginkan. Setiap lembaga menggunakan pendekatan yang berbeda-beda tergantung dari situasi dan kondisi, begitu pula dengan hubungan dengan kegiatan komunikasi yang dilakukan oleh suatu partai politik, berhasil atau tidaknya sangat ditentukan oleh strategi partai politik dalam komunikasi yang dilakukan untuk membangun kerjasama dengan pemerintah.

⁴ Asep Saiful Mahtadi, *Komunikasi Politik Indonesia*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008) hal. 27

⁵ *Ibid.*

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan salah satu partai politik yang berasaskan Islam. Hal tersebut telah tertulis secara gamblang di AD-ART partai. Tujuan dari PKS adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wata'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Visi partai adalah menjadi partai pelopor dalam mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Misi partai adalah menjadikan partai sebagai sarana perwujudan masyarakat madani yang adil, sejahtera, dan bermartabat yang diridloi Allah subhanahu wata'ala, dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberadaan partai PKS baik tingkat pusat, daerah dan kabupaten/kota memposisikan sebagai sebuah partai yang memiliki sikap oposisi dengan pemerintah. Hal tersebut menjadi salah satu tolak ukur, bahwa dalam negara demokrasi perlu ada partai oposisi agar ada yang kritik dan mengawasi jalan sistem pemerintah dengan baik. Namun oleh demikian PKS tetap bersedia membangun kerjasama dengan pemerintah dalam mengembangkan pembangunan dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Adapun dalam membangun kerjasama dengan pemerintah disebut *Bargaining* melalui jalur politik. *Bargaining* merupakan perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam menjalankan sistem yang telah disepakati dengan cara bekerjasama dengan partai.⁶ Namun demikian, *bargaining* politik dalam hal ini

⁶Bambang Purwoko, *Membangun Kemitraan Startegis, Posisi DPRD di Tengah arus Perubahan*, Yogyakarta: UGM, 2000, hlm: 34.

bertujuan untuk menciptakan suasana musyawarah dalam menciptakan berjalannya program-program pemerintah khususnya di Aceh.

Pemerintahan Aceh sebuah lembaga negara di tingkat daerah yang memiliki struktur dan jajarannya. Namun sejauh ini pemerintah Aceh masih tergolong rendah dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan terhadap rakyat Aceh, hal ini dapat lihat dari meningkatnya angka kemiskinan Aceh tahun 2021 bertambah dari 833,91 ribu jiwa pada September tahun 2020 menjadi 834,24 ribu jiwa pada Maret tahun 2021.⁷ Kemudian berdasarkan Tingkat Partisipasi Kerja (TPAK) provinsi-provinsi Sumatera yaitu, terdapat tiga provinsi di Sumatera dengan persentase pengangguran lebih tinggi dari rata-rata nasional termasuk Aceh (6,30 persen).⁸ Oleh karena itu, pemerintah Aceh perlu membangun kerjasama dengan berbagai lembaga salah satunya dengan DPW PKS Aceh sebagai lembaga mitra pemerintah. Maka oleh karenanya untuk kelancaran hubungan kerjasama tersebut tentu DPW PKS harus memiliki strategi yang tepat, agar bisa tercipta perubahan baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial politik dan lain sebagainya. Strategi merupakan suatu rencana penting setiap organisasi atau partai politik mencapai suatu tujuan yang diinginkan, melalui dengan berbagai taktik dan teknik sesuai dengan keperluan masing-masing lembaga.⁹

Kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKS masa bakti 2020-2025. Ketua (DPW) Makhyaruddin Yusuf dan pengurus lainnya masih solid sampai sekarang untuk membangun kerjasama dengan pemerintah Aceh. Pada Pertemuan

⁷ BPS. *Statistik Daerah Provinsi Aceh 2021*

⁸ *Ibid.*

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hal 445

dengan pengurus DPW PKS Aceh pada tanggal 12/06/2021, Nova Iriansyah selaku Gubernur Aceh mengatakan bahwa pemerintah Aceh sangat menerima kritikan dari siapapun asal konstruktif untuk mendorong upaya perbaikan kedepan baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah Aceh juga membutuh dukungan dari PKS dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Menyikapi pernyataan tersebut, Tgk Makhyaruddin Yusuf menyampaikan jika PKS lewat Fraksi PKS di DPRA siap membangun kerjasama dalam berbagai aspek dan memberikan dukungan penuh kepada Pemerintah Aceh untuk membangun daerah Aceh kedepan.¹⁰ Akan tetapi fraksi PKS di pemerintahan sangat sedikit menduduki kursi di parlemen.

Berdasarkan data awal yang ditemukan oleh peneliti melalui wawancara dengan salah satu pengurus DPW PKS bahwa Partai Keadilan Sejahtera bukanlah partai koalisi dari pemerintahan, sehingga keberadaan PKS tidak mempunyai andil yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan politik pemerintah saat ini. sehingga dalam praktiknya sangat menyulitkan bagi PKS dalam menyuarakan dan memenangkan dalam penentuan kebijakan politik (*politic police*). yang menjadi menarik disini adalah bagaimana strategi DPW PKS dan pemerintah Aceh dalam membangun kerjasama dengan baik untuk menciptakan perubahan Aceh masa akan datang. Maka oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan judul **“Strategi Membangun *Bargaining* Antara Eksekutif dan Legislatif di Pemerintahan Aceh (Studi Kasus DPW PKS Aceh)”**

¹⁰ Redaksi. *Silaturahmi Kebangsaan PKS Aceh Berlanjut, kali ini Sembangi Demokrat*, Juni 2021. Diakses pada 30 Juli 2022 dari situs: <https://harianrakyataceh.com/2021/06/12/silaturahmi-kebangsaan-pks-aceh-berlanjut-kali-ini-sambangi-demokrat/>

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi DPW PKS dalam membangun *bargaining* dengan pemerintah Aceh?
2. Apa saja hambatan DPW PKS dalam membangun kerjasama dengan pemerintah Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi DPW PKS dalam membangun *bargaining* dengan pemerintah Aceh.
2. Untuk mengetahui hambatan DPW PKS dalam membangun kerjasama dengan pemerintah Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1.4.1 Mamfaat secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang lebih luas terhadap bidang ilmu politik, khususnya menegenai kerjasama parpol dengan lembaga pemerintahan.
2. Penelitian ini untuk menambah pengalaman penulis di lapangan, dapat berguna sebagai referensi atau tambahan informasi dalam penambahan ilmu pengetahuan mengenai *bergaining* politik.

1.4.2 Mamfaat secara Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana strategi *bergaining* politik partai, khususnya PKS dalam pemerintahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk DPW PKS Aceh dalam membungun hubungan kerjasama dengan lembaga pemerintahan.

1.5 Definisi Operasional

1. Strategi

Strategi merupakan rencana penting setiap organiasasi atau partai politik mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Strategi merupakan ilmu tentang teknik dan taktik, kiat atau muslihat untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Strategi yang penulis maksud adalah cara DPW PKS membangun kerjasama dengan pemerintah Aceh.¹¹

2. *Bargaining*

Bargaining merupakan salah satu jalan untuk mencapai tujuan tertentu upaya mencapai tujuan bersama terutama yang mengatasnamakan kepentingan rakyat. *Bargaining* yang penulis maksud adalah sistem kerjasama atau tawar-menawar yang dibangun oleh DPW PKS untuk membantun program pemerintah Aceh masa akan datang.¹²

3. Eksekutif

¹¹ *Ibid.* hal. 445

¹² Robert Powell, *Bargaining Theory and International Conflict*. Departement of Political Science: University of California, 2002), hlm: 22

Eksekutif merupakan Eksekutif merupakan lembaga yang dipimpin oleh raja atau presiden beserta kabinetnya yang melaksanakan undang-undang yang telah disahkan bersama dengan lembaga legislatif. Eksekutif yang penulis maksud adalah lembaga pemerintah Aceh yang dipimpin oleh seorang Gubernur di tingkat Provinsi.¹³

4. Legislatif

Legeslatif merupakan lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang/fungsi pengaturan (legislation), juga berfungsi sebagai lembaga pengawasan (*control*) dan fungsi perwakilan (*representation*). Legeslatif yang dimaksud adalah politisi yang mewakili dari partai PKS di tingkat provinsi Aceh.¹⁴

5. Pemerintah Aceh

Pemerintah Aceh merupakan sebuah lembaga negara ditingkat provinsi yang memiliki wewenang penuh dalam menjalankan visi-misinya untuk menciptakan kesejahteraan terhadap rakyat Aceh baik masa sekarang maupun masa akan datang.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ini, penulis membagi pokok pembahasan dalam 5 (lima) BAB, dan pembahasan di bagi dalam beberapa sub bab.

BAB I : Pendahuluan

¹³ Sofyan Hadi, *Fungsi Legislasi dalam Sistem Pemerintahan Presidensial (Studi Perbandingan Indonesia dan Amerika Serikat)*, Jurnal Ilmu Hukum DIH, Vol 9, No. 18, tahun 2013 hal 78

¹⁴ Marwan dan Jimmi P, *Kamus Hukum*, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hal. 403

Menguraikan tentang: (1) Latar Belakang, (2) Rumusan Masalah, (3) Tujuan Penelitian, (4) Mamfaat Penelitian, (5) Sistematika Pembahasan, (5) Penelitian Terdahulu.

BAB II : Landasan Teori

Menguraikan tentang: (1) strategi, (2) partai politik, (3) bergaining, (4) legislatif, (5) Eksekutif.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang: (1) Jenis Penelitian, (2) Lokasi Penelitian, (3) Informan Penelitian, (4) sumber data, (5) teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara, (6) teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Menguraikan tentang: (1) Demografi Provinsi Aceh, 2. Profil PKS, 3. Visi Misi PKS, 4. Strategi *bargaining* DPW PKS dengan pemerintah Aceh, terdiri dari: (1) strategi *bargaining* partisipasi partai, dan (2) strategi *bargaining* Isu Publik.

BAB V : Penutup

Berisikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang sudah dilakukan.